

RINGKASAN

DODI FAEDLULLOH, Program Studi Ilmu Administrasi-Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Implementasi Kebijakan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Kabupaten Banyumas, Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Israwan, S., M.S, Anggota: Dr. Slamet Rosyadi, M.Si.

Dinamika regulasi perkoperasian di Indonesia menemui respon beragam. Pasca amar putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang memutuskan UU No. 17 Tahun 2012 inkonstitusional, maka untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukanlah kembali UU lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Situasi ini cukup problematik, karena berlakunya kembali UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai sebagian kalangan sudah tidak relevan dengan jatidiri koperasi dan kebutuhan hukum di Indonesia. Konsekuensi dari situasi ini relasi antar negara dan koperasi berjalan semakin dinamis. Di daerah-daerah pun demikian. Salah satunya Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi UU No. 25 Tahun 1992 di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian ini Kopkun, KPRI Sehat RSMS, CU Cikalmas, KUD Aris, Disperindagkop Kab. Banyumas, dan Dekopinda Kab. Banyumas dengan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*. Metode analisis dengan metode analisis interaktif, dan validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian mengungkapkan target yang ditetapkan atau isi kebijakan memiliki ambiguitas sehingga koperasi-koperasi sebagai *street level bureaucrats* merespon kebijakan tersebut secara beragam. Relasi koperasi, baik yang terjadi di Kopkun, KPRI Sehat RSMS, KUD Aris dan CU Cikalmas terjalin baik jadi dilema *street level bureaucrats* yang terjadi dalam implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tidak berhubungan dengan relasi koperasi yang dibangun. Partisipasi anggota dalam merespon dan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1992 ini terbangun melalui forum forum yang diselenggarakan koperasi. *Coping Mechanism* yang dilakukan dalam proses implementasi ini masing-masing koperasi memanfaatkan dua karakter dasar *street level bureaucrats* , yaitu: keleluasaan yang tinggi dan relatif otonom dari otoritas organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi UU No. 25 Tahun 1992 di Kabupten Banyumas yaitu isi dari kebijakan (*content of policy*) tidak jelas sehingga membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Kemudian faktor pendukung dari implemementasi yaitu *context of policy* yaitu adanya diskresi pada koperasi saat *coping mechanism*.

Kata kunci : implementasi, koperasi, undang-undang.

SUMMARY

DODI FAEDLULLOH, Public Administration-Post Graduate Program, Jenderal Soedirman University, University General Sudirman, Implementation of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives in Banyumas, Chief: Prof. Dr. Israwan, S., M.S, Member: Dr. Slamet Rosyadi, M.Si.

Dynamics of cooperative regulatory meets the pros and cons in Indonesia. After ruling of the Constitutional Court No. 28 / PUU-XI / 2013 that decided Law No. 17 of 2012 is unconstitutional, then to fill the legal vacuum to be applied back the old Law No. 25 of 1992 on Cooperatives. This situation is problematic, because the re-enactment of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives assessed in part is not relevant to the identity of cooperatives and the needs of law in Indonesia. The consequences of this situation the relation between the state and cooperative become more dynamic. This research aims to analyze process of implementation and the factors that affect the Law No. 25 of 1992 in Banyumas.

This research applied descriptive qualitative method. Objectives of this research are Kopkun, KPRI Sehat RSMS, CU Cikalmas, KUD Aris, Disperindagkop Kab. Banyumas, and Dekopinda Banyumas. Selection technique to chose informants by researcher use purposively sampling. Analized method applied interactive analized and validity of data applied source triangulation technique.

The results of the study revealed the target or content of policy has ambiguities that co-operatives as a street level buraucrats responds in various ways. Relationship in Kopkun, KPRI Sehat RSMS, KUD Aris and CU Cikalmas is good. So their dilemmas of the implementation of Law No. 25 of 1992 is not related to the cooperative relationships. Participation of members in response and implementation of Law No. 25 of 1992 was developed in forum organized by cooperatives. Coping Mechanism in the process of implementation utilizes character of street level buraucrats, they are: high flexibility and relative autonomy from organizational authority. Factors that influence the implementation of Law No. 25 of 1992 in Banyumas districts, is the content of policy that not clear make confuse the implementers. Then the supporting factors of the implementation that is the context of the policy that is the discretion of the cooperative when coping mechanism.

Keywords: cooperative, implementation, regulation